

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global dan menjadi perhatian banyak orang di dunia, termasuk Indonesia. Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui program-program pembangunan secara menyeluruh. Penggunaan strategi yang fokus pada pemulihan dan rehabilitasi atau yang fokus pada program preventif, mitigasi dan pembangunan yang multisektoral, multidimensi dan multilevel merupakan pilihan yang harus diambil oleh pemerintah sebagai pengemban amanat pembangunan yaitu. Dan tentu saja membantu pemangku kepentingan lainnya (Adi, 2005).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah tujuan pembangunan global yang mencakup 17 tujuan, salah satunya adalah pengentasan kemiskinan ekstrim pada tahun 2030. Ini merupakan tantangan global utama dan indikator keberhasilan dalam pembangunan berkelanjutan. Beberapa tujuan pengentasan kemiskinan ekstrim pada tahun 2030 adalah untuk setidaknya mengurangi separuh proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari segala usia yang hidup dalam kemiskinan, memberikan hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi dan akses ke layanan dasar dan menerapkan sistem perlindungan sosial. Itu berlaku untuk semua orang, termasuk orang miskin dan tidak berdaya.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laporan yang menyebutkan pada Maret 2021 sebanyak 10,14% atau 27,54 juta penduduk Indonesia tergolong miskin. Penurunan pendapatan keluarga dianggap sebagai penyebab utama menurunnya kesejahteraan keluarga (berdasarkan pengeluaran individu). Di Indonesia, 75% rumah tangga mengalami penurunan pendapatan selama pandemi. Sebanyak 66% rumah tangga dengan usaha kecil juga mengalami penurunan omzet pembeli. Selain itu, pada Agustus 2020 terjadi peningkatan angka pengangguran sebesar 2,7 juta orang (Smeru, Prospera, UNDP, 2021)

Kecamatan Kutawaringin merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dengan presentase penduduk miskin sebesar 6,91% yaitu sebanyak 263.600 jiwa pada tahun 2020 (BPS 2021). Hal ini menunjukkan peningkatan presentase penduduk miskin yang ada di Kecamatan Kutawaringin sebanyak 1% dari jumlah penduduk. Maka dari itu dibutuhkannya berbagai inisiatif pengentasan kemiskinan, kebijakan dan program untuk mengatasi masalah kemiskinan di Kecamatan Kutawaringin dengan efektif dan efisien.

Program Keluarga Harapan yang biasa disebut PKH adalah bantuan tunai bersyarat yang diterapkan di Indonesia sudah sejak tahun 2007. Sebagai bantuan yang bersyarat, PKH ditujukan kepada rumah tangga miskin yang memiliki anak sekolah, balita, ibu hamil, lansia dan disabilitas. Melalui PKH, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan layanan sosial dasar kesehatan, Pendidikan, pangan, dan gizi, perawatan dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan sebagai

pondasi untuk mengatasi kemiskinan yang menggabungkan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan nasional.

Indikator keberhasilan dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari PKH untuk mandiri dan secara sukarela melepaskan diri dari atau untuk tidak lagi menerima bantuan sosial Keluarga Harapan yang selama ini didapatkannya. Indikator itu harus jadi target utama Program PKH. Karena itu, target graduasi ini harus dilakukan secara terukur dan sistematis melalui pendampingan para SDM PKH.

Program Keluarga Harapan (PKH), jika tidak dikelola dengan baik maka akan terjebak pada *charity* semata dan terkesan hanya bagi-bagi uang yang sifatnya instan tanpa memikirkan masyarakat miskin yang akan datang. Program yang sifatnya *charity* bisa menyejahterakan masyarakat namun sifatnya sementara. Berbanding terbalik dengan pandangan pemberdayaan, masyarakat miskin diberikan program agar mereka mempunyai daya (*power*) sehingga setelah menerima program akan keluar dari garis kemiskinan. Program ini berorientasi ke depan dan sifatnya lebih permanen. Namun prosesnya membutuhkan waktu lama dan programnya harus berkelanjutan.

Salah satu model pemberdayaan yang dapat untuk mengatasi permasalahan sosial penerima manfaat Program Keluarga Harapan Graduasi adalah kewirausahaan sosial. Pendekatan kewirausahaan sosial adalah pendekatan pemberdayaan yang dapat menggunakan prinsip-prinsip kewirausahaan untuk memecahkan masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Model ini dapat

dikembangkan secara terintegrasi, dengan sistem usaha konvensional, berjalan beriringan ataupun secara terpisah (Masturin, 2015).

Konsep kewirausahaan sosial merupakan perluasan dari konsep dasar kewirausahaan yang secara historis telah diakui sebagai pengungkit ekonomi, terutama dalam menyelesaikan masalah sosial (Noruzi et al., 2010; Patra dan Nath, 2014). Meskipun bersifat *multifacet*, kewirausahaan merupakan serangkaian perilaku individu dalam menjalankan kegiatan ekonomi melalui upaya pemanfaatan berbagai peluang untuk dapat menciptakan nilai. Dalam konteks kewirausahaan sosial, nilai yang dituju adalah nilai sosial sebab kewirausahaan sosial sangat menekankan bagaimana menciptakan ide atau gagasan yang bersifat inovatif dalam rangka menyelesaikan permasalahan sosial.

Membangun social enterprise atau kewirausahaan sosial kini kian menjadi tren di tengah masyarakat yang ada di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Para pendiri dan pekerja wirausaha sosial ini memiliki peran yang sangat substansial bagi perbaikan berbagai isu sosial yang sedang dihadapi di era sekarang. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi-inovasi terbaru, para KPM (Keluarga Penerima Manfaat) inspiratif ini selalu berusaha untuk menciptakan dampak yang akan meningkatkan kualitas kehidupan di sekitar mereka.

Upaya pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat miskin dan rentan yaitu dengan mengembangkan inovasi program penanggulangan kemiskinan dengan melakukan upaya-upaya pemberdayaan sosial melalui kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) yang bersifat kegiatan

integratif dan adaptif yang bernama Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS). Kewirausahaan sosial ini dapat menjadi alternatif kegiatan untuk memutus ketergantungan KPM terhadap bantuan sosial dan mengarahkannya menjadi produktif serta mandiri. Program Kewirausahaan Sosial pertama kali dilaksanakan pada tahun 2020 yang diuji cobakan kedalam lima kabupaten/kota di Indonesia (Setiawan, 2021).

Pada dasarnya, program kewirausahaan sosial adalah suatu bisnis yang dibangun dengan tujuan mengatasi masalah-masalah yang ada di suatu kelompok masyarakat, seperti masalah ekonomi, kesehatan masyarakat, pendidikan, lingkungan, sanitasi dan lain sebagainya. Dengan terus berinovasi dan bereksperimen menggunakan teknologi terkini, pelaku usaha sosial terus berupaya untuk mengisi celah-celah kesenjangan yang terdapat dalam kehidupan di sekitar mereka. Tak hanya itu, bisnis yang dijalankan untuk kebaikan komunitas akan meningkatkan keyakinan terhadap suatu identitas lokal, dan membantu mengembangkan kepercayaan diri masyarakat lokal akan kemampuan mereka untuk mandiri secara finansial.

Kementerian sosial melaksanakan pemberdayaan dalam bentuk kewirausahaan sosial melalui Program Kewirausahaan Sosial (ProKus) yang telah dilaksanakan diberbagai wilayah di Indonesia. Kementrian Sosial meluncurkan Program Kewirausahaan Sosial yang memiliki tujuan menciptakan kemandirian serta memutus ketergantungan keluarga miskin dan rentan terhadap bantuan sosial (Kepdirjendayasos Nomor 651/045.3/KPTs/10/2021) Kementerian Sosial mengembangkan tugas melaksanakan berbagai program inovasi termasuk

pemberdayaan sosial di samping perlindungan dan jaminan sosial. Kemandirian dapat dicapai jika penerima bantuan memiliki jiwa kewirausahaan sosial yang semakin menguat. Program kewirausahaan sosial (ProKus) merupakan program yang menasar keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah graduasi atau keluar dari Program Keluarga Harapan (PKH) agar terbentuknya kemandirian secara ekonomi sehingga mereka tidak kembali terpuruk secara ekonomi setelah tidak lagi mendapat bantuan melalui PKH.

Hal itu dilakukan agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dapat berdaya dengan usaha yang di rintisnya. KPM PKH tidak hanya terfokus pada profit tetapi manajemen usahanya juga harus di perhatikan seperti kemasan produk yang menarik, strategi pemasaran yang menggunakan digital marketing dan lainnya. Kebijakan kementerian sosial tentang ProKus merupakan suatu kebijakan yang inovatif dan berkembang. KPM menjadi graduasi atau terhubung dengan Kementerian/Lembaga yang menangani perkerjasama, UKM, pembiayaan kredit usaha mikro dan/atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Lembaga terkait lainnya untuk pengembangan pemasaran dan ekspo hasil usaha ProKUS.

Program Kewirausahaan sosial (ProKus) ini telah diselenggarakan di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya ada di Kabupaten Bandung. Program Kewirausahaan sosial (ProKus) di Kabupaten Bandung ini diselenggarakan di 9 Kecamatan 48 Desa dan 150 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bidang usaha yang diselenggarakan yaitu terdiri dari 3 bidang fashion/konveksi, 1 bidang kriya,

1 bidang kuliner dan 1 bidang jasa serta dimentori oleh 6 mentor yang telah diseleksi.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Program Kewirausahaan Sosial pada KPM PKH di Kecamatan Kurtawaringin, Kabupaten Bandung. Program Kewirausahaan sosial (ProKus) yang dilaksanakan di Kecamatan Kurtawaringin adalah salah satu ProKus yang pelaksanaannya di bawah naungan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Selain itu, penelitian ini penting dilakukan agar proses dalam Program Kewirausahaan Sosial (ProKus) di Kecamatan Kurtawaringin, Kabupaten Bandung ini diharapkan dapat menjadi gambaran dan *role model* dalam program yang sama maupun program atau inisiatif pemberdayaan lainnya. Peneliti mengajukan penelitian dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Kewirausahaan (ProKus) di Kecamatan Kurtawaringin Kabupaten Bandung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Pelaksanaan Masyarakat dalam Program Kewirausahaan Sosial (ProKus) pada KPM PKH di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung”. Selanjutnya fokus penelitian tersebut dibagi menjadi beberapa rumusan permasalahan berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan pemberdayaan dalam Program Kewirausahaan Sosial di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Kewirausahaan Sosial di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana implikasi praktis dan teoritis Pekerjaan sosial?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitia

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan memahami secara detail dan mendalam perihal pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui Program Kewirausahaan Sosial di Kabupaten Kutawaringin. Secara lebih rinci, tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengkaji tentang:

1. Untuk mengetahui Proses pelaksanaan pemberdayaan dalam Program Kewirausahaan Sosial di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Program Kewirausahaan Sosial di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui implikasi praktis dan teoritis pekerjaan sosial.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan masukan, sumbangan dan kontribusi bagi pengembang praktek pekerjaan sosial khususnya mengenai Kewirausahaan Sosial (ProKus) terutama bagi pengembangan ilmu di dalam bidang pekerjaan sosial.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap upaya pemecahan masalah tentang pelaksanaan Program Kewirausahaan Sosial (ProKus) dan sebagai bahan dasar untuk usulan pertimbangan membuat kebijakan dalam pelaksanaan pemberdayaan.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti lain. Tabel berikut merupakan penelitian-penelitian yang telah dilakukan peneliti lain, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul/Jurnal	Author	Hasil
1.	Membangun usaha kreatif, inovatif dan bermanfaat melalui penerapan kewirausahaan sosial	Rintan Saragih (2017)	Kewirausahaan sosial adalah tindakan berinovasi dan mengenali masalah sosial dengan menggunakan prinsip kewirausahaan. Modal dasar yang dibutuhkan untuk menjadi wirausahawan sosial adalah lebih kepada komitmen untuk membuat perubahan sosial berdasarkan tujuan mulia. Pengusaha sosial harus memiliki strategi berdasarkan kekuatan sosial untuk menyebarkan pengaruhnya, penggunaan media sosial akan membantu organisasi maupun individu untuk menyebarkan

			<p>permasalahan yang dialami masyarakat.</p> <p>Untuk itu pengusaha sosial berfokus pada pengalaman yang dialami masyarakat, sehingga sangat perlu untuk menjalin komunikasi serta membangun empati melalui peristiwa yang dialami oleh masyarakat.</p>
2.	<p>Pengentasan kemiskinan melalui pendekatan kewirausahaan sosial.</p>	<p>Nur Firdaus (2018)</p>	<p>Kewirausahaan sosial yang muncul sebagai respon atas kegagalan pemerintah menjadi signal bahwa peran pemerintah dalam upaya pengurangan kemiskinan diharapkan lebih nyata. Keberadaan pelaku praktik kewirausahaan sosial dapat menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi di masa yang akan datang sehingga upaya percepatan pengentasan kemiskinan dapat terwujud. Kerjasama dan insentif dapat diarahkan pada praktik kewirausahaan sosial yang</p>

			sudah terbukti dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga model-model wirausaha sosial akan banyak bermunculan dan tumbuh dengan subur.
3.	Peran Kewirausahaan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat	Denny Riezki Pratama (2019)	Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa pemberdayaan masyarakat dan kewirausahaan sosial dapat membantu memahami kompleksitas CSR dan pembangunan berkelanjutan di tingkat local.
4.	Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Sosial	Agus Rilo Pambudi, Budi Rahardjo (2021)	Hasil penelitian menunjukan bahwa sektor ekonomi kreatif dapat meningkatkan pendapatan masyarakat begitu juga dengan kewirausahaan sosial dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
5.	Pembentukan Kemandirian Melalui Pembelajaran Kewirausahaan Sosial	Endah Andayani, Lilik Sri Hariani, dan Muchammad Jauhari (2021)	Hasil dari penelitian ini menunjukan model atau rekayasa sosial tentang proses pembentukan

	untuk Meningkatkan Kesadaran Sosial dan Kesadaran Ekonomi		kemandirian yang tepat melalui kewirausahaan sosial dan alasan perlunya kemandirian. Hasil penelitian ditemukan bahwa pembentukan kemandirian melalui kewirausahaan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi merupakan alasan yang sangat kuat untuk dilaksanakan kewirausahaan sosial.
6.	Program Pengembangan Kewirausahaan Untuk Menciptakan Pelaku Usaha Sosial Yang Kompetitif	Didip Diandra (2019)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penciptaan pelaku usaha baik pelaku usaha konvensional maupun khususnya pelaku usaha sosial yang kompetitif dan berdaya saing tinggi yang didukung oleh kemampuan teknis (hardskills) dan kemampuan lunak (softskills).

7.	Kewirausahaan Sosial Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Implementasi Kewirausahaan Sosial APIKRI di Desa Wisata Krebet, Dusun Krebet, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, DIY)	AL ROSYID ANGGI S, Eka Zuni Lusi Astuti, S.Sos., M.A. (2016)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial APIKRI bukanlah pengakuan dari APIKRI sendiri. Julukan ini diberikan oleh civitas akademika yang mengerti mengenai kewirausahaan sosial dan kegiatan yang dilakukan oleh APIKRI. Pendekatan yang dilakukan APIKRI pragmatis yaitu membantu pemasaran para pengrajinnya, kemudian dikembangkan usaha bisnisnya. Alasan kenapa APIKRI mengembangkan pengrajin kecil sama seperti alasan berdirinya APIKRI yakni pengrajin adalah bagian masyarakat yang tidak diuntungkan dari sisi sosial dan politik.
8.	Peran Kewirausahaan Sosial (Social Entrepreneurship) Di Dalam Pemberdayaan Masyarakat Marjinal Studi Kasus Kegiatan	Fitria Diani Oktaria, (2017)	Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa keberadaan Nara Kreatif berperan sebagai agen perubahan. Dimana Nara Kreatif memberikan

	<p>Kewirausahaan Sosial Nara Kreatif</p>	<p>pembinaan dengan penanaman nilai-nilai kewirausahaan sosial sebagai bentuk internalisasi usaha sosial Nara Kreatif pada anak-anak jalanan seperti nilai kejujuran, kepedulian, kekeluargaan, keadilan, keterbukaan, kepemimpinan, kemandirian, kedisiplinan dan tanggung jawab. Lalu, Nara Kreatif menjadi sarana yang memberdayakan melalui kegiatan positif yang dijalani anak jalanan dengan menumbuhkan kreatifitas pada kegiatan pelatihan keterampilan berupa pembuatan produk daur ulang kertas, sablon, menjahit, menari, lalu juga memfasilitasi pendidikan mereka. Potret perubahan yang tercipta yaitu pada pembentukan karakter positif anak jalanan, tambah kreatif, dan mempunyai gambaran</p>
--	--	---

		<p>akan masa depan (future oriented). Kewirausahaan sosial menjadi sarana dalam upaya peningkatan kehidupan masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan mengakses sumber ekonomi.</p> <p>Kebermanfaatan Nara Kreatif pada anak jalanan yaitu adanya misi sosial, lalu orientasi dan tujuannya juga pada memberikan keuntungan bisnis bagi usaha yang dibangun Nara Kreatif (Profit oriented) untuk keberlanjutan misi pemasaran produk.</p> <p>Berdasarkan hasil yang nyata di lapangan, pengaruh yang diberikan agen (Nara Kreatif) sudah dapat mempengaruhi struktur masyarakat pada anak jalanan. Sehingga konstruksi teori Giddens telah mencapai titik dimana usaha sosial ini telah memberikan nilai-nilai pada anak jalanan</p>
--	--	---

			yang mengarah pada aktivitas kehidupan yang lebih baik.
9.	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewirausahaan Sosial (Studi Sentra Budidaya dan Pengolahan Perikanan Air Tawar)	<u>Yudi Ariski</u>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Si Pujuk Farm telah memenuhi kelima syarat kewirausahaan sosial yang dikemukakan oleh Haryati dalam bukunya. Pada aktivitasnya pemberdayaan Si Pujuk juga melakukannya dalam tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan perdayaan. Dimana tahapan yang dilalui tersebut telah berhasil memberikan dampak yang signifikan kepada penerima manfaat dalam empat kategori yaitu bina manusia, usaha, lingkungan dan kelembagaan.
10.	Pemberdayaan Perempuan Melalui Kewirausahaan Sosial Dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi	Hilman Palaon dan Laksmi Andam Dewi (2019)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan Tantangan yang dihadapi usaha sosial dalam melakukan pemberdayaan untuk

			<p>perempuan adalah terbatasnya akses perempuan terhadap dunia luar, belum memiliki keterampilan dan kemampuan yang mendukung pekerjaan mereka, serta kurangnya pengetahuan karena tingkat pendidikan yang rendah. Melalui pelatihan, para perempuan mempelajari bagaimana menghasilkan produk berkualitas. Mereka juga dilatih untuk mengelola waktu dengan baik karena di samping mengurus rumah tangga, mereka juga memiliki target untuk menyelesaikan pekerjaan. Keterlibatan dalam kewirausahaan sosial telah berperan dalam memberdayakan perempuan melalui dua cara, yaitu pemberdayaan ekonomi dan pengembangan diri. Hal ini mendorong terjadinya perubahan sosial pada</p>
--	--	--	---

			kehidupan perempuan sebagai individu, dalam keluarga, serta dalam masyarakat, yaitu perempuan dapat bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, membuat keputusan sendiri, serta memiliki pandangan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
--	--	--	--

Berdasarkan hasil analisis matriks diatas, penelitian terdahulu belum ada yang melakukan kajian atau penelitian terhadap proses pemberdayaan masyarakat yang mencakup tahap perencanaan (*planning*), pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam pengembangan, penguatan potensi, dan pemeliharaan pada KPM Program Kewirausahaan Sosial di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung. belum terdapat juga penelitian yang membahas tentang Pemberdayaan pada kpm pkh dalam Program Kewirausahaan Sosial khususnya di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung. Analisis penelitian terdahulu juga membantu peneliti dalam pencarian literatur yang sesuai.